Politik Gender dalam Islam

Aminuddin¹, Thorieq Al Abdu², Andre Selamat Sinaga³, Mhd Wildan Arifin Batubara⁴,
Muhammad Albani⁵, Fikri Dwi Septiyan⁶, Reyza Dian Isnaini Prastya⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

e-mail: aminuddin8607@gmail.com¹, alabduhorieq@gmail.com²,

andreselamat1403@gmail.com³, wildanbara24@gmail.com⁴,

muhammadalbani182003@gmail.com⁵, sfikridwi@gmail.com⁶, hereos9870@gmail.com⁷

Abstrak

Artikel ini menganalisis politik gender dalam Islam melalui berbagai perspektif yang saling berhubungan, dengan menyoroti aspek teologi gender dalam Al-Qur'an dan Hadis, konstruksi sosial gender, serta keterlibatan perempuan dalam ranah politik. Pertama, dibahas pandangan Al-Qur'an dan Hadis mengenai peran gender, serta bagaimana tafsiran terhadap teks-teks tersebut mempengaruhi pemahaman tentang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam konteks sosial dan agama. Selanjutnya, artikel ini mengkaji bagaimana konstruksi gender dalam masyarakat Muslim seringkali terkait dengan struktur kekuasaan, yang memengaruhi posisi perempuan dalam kehidupan publik dan politik. Penelitian ini juga menggali sejauh mana perempuan terlibat dalam politik Islam, baik dari perspektif sejarah maupun perkembangan politik di dunia Islam kontemporer. Selain itu, isu-isu gender dalam kebijakan publik Islam diidentifikasi sebagai bagian dari upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang ada. Di akhir, artikel ini menyimpulkan tantangan dan peluang yang dihadapi perempuan dalam politik Islam modern, serta kontribusi mereka dalam membentuk kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

Kata Kunci : *Teologi Gender, Partisipasi Perempuan, Kebijakan Publik Islam.*

Abstrak

This article analyzes gender politics in Islam through various interconnected perspectives, highlighting aspects of gender theology in the Qur'an and Hadith, the social construction of gender, and women's involvement in the political sphere. First, it discusses the Qur'anic and Hadith views on gender roles and how interpretations of these texts influence the understanding of women's and men's positions in social and religious contexts. Next, the article examines how gender construction in Muslim societies is often linked to power structures, affecting women's roles in public and political life. The study also explores the extent of women's involvement in Islamic politics, both from a historical perspective and in contemporary developments within the Islamic world. Additionally, gender issues in Islamic public policy are identified as part of efforts to address existing gender inequalities. Finally, the article concludes with the challenges and opportunities faced by women in modern Islamic politics, as well as their contributions to shaping more equitable and inclusive policies..

Keywords : *Gender Theology, Women's Participation, Islamic Public Policy.*

PENDAHULUAN

Diskursus tentang politik gender dalam Islam sering kali berkelindan dengan berbagai asumsi yang berakar pada pemahaman tekstual dan realitas kultural. Islam, sebagai agama yang mengatur aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, telah memberikan ruang interpretasi yang luas mengenai relasi antara laki-laki dan perempuan. Namun, di tengah kompleksitas tafsir Al-Qur'an dan Hadis, muncul pertanyaan mendasar: Apakah perempuan dan laki-laki dalam Islam memiliki peran yang setara, atau terdapat hierarki tertentu yang ditetapkan? Polemik ini tidak hanya menjadi bahan kajian akademik, tetapi juga turut mempengaruhi konstruksi sosial dan dinamika politik di masyarakat Muslim.

Dalam konteks sosial, peran perempuan sering kali terkungkung dalam persepsi yang dilembagakan oleh tradisi, bukan semata-mata oleh ajaran Islam itu sendiri. Perempuan, yang di era Nabi Muhammad SAW memiliki kontribusi signifikan di bidang ekonomi, pendidikan, dan bahkan politik, justru di beberapa periode sejarah mengalami marginalisasi. Hal ini menimbulkan paradoks antara nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan praktik kultural yang cenderung patriarkal. Oleh karena itu, menelaah politik gender dalam Islam menjadi penting, bukan hanya untuk memahami posisi perempuan dalam sistem keagamaan, tetapi juga untuk membongkar lapisan-lapisan interpretasi yang memengaruhi kebijakan publik dan ruang politik.

Pada ranah politik, peran perempuan dalam masyarakat Muslim telah mengalami dinamika yang fluktuatif. Sejarah mencatat kiprah perempuan Muslim yang mampu mendobrak batasan struktural, baik dalam pemerintahan maupun kepemimpinan politik. Namun, fakta ini sering kali dikaburkan oleh narasi yang mengasosiasikan perempuan hanya dengan ranah domestik. Di era kontemporer, keterlibatan perempuan dalam politik tidak bisa lagi diabaikan. Mereka hadir sebagai legislator, aktivis, bahkan pemimpin negara, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan seperti diskriminasi struktural dan stereotip gender yang kaku.

Lebih jauh, kebijakan publik dalam konteks Islam memainkan peran sentral dalam mendorong atau menghambat keadilan gender. Upaya untuk menghadirkan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap realitas perempuan sering kali dipandang sebagai langkah progresif, tetapi juga tak jarang menuai resistensi dari kelompok konservatif. Inilah yang menjadikan politik gender dalam Islam sebagai medan dialektika antara teks, tafsir, dan praksis sosial.

Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana politik gender dalam Islam dapat dipahami melalui pendekatan multidimensional. Mulai dari kajian teologis tentang teks Al-Qur'an dan Hadis, dinamika sosial budaya, hingga partisipasi perempuan dalam politik kontemporer. Tulisan ini berupaya menelaah tantangan sekaligus peluang yang dihadapi perempuan dalam politik Islam modern, serta mengidentifikasi potensi kontribusi mereka dalam menciptakan kebijakan publik yang lebih adil dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif- analitis untuk menggali lebih dalam tentang politik gender dalam Islam. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber primer, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta kitab-kitab tafsir klasik dan modern. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada sumber sekunder berupa jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema politik gender dan partisipasi perempuan dalam Islam. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap teks-teks keagamaan dan konteks sosial yang melingkupinya.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan menelaah literatur yang berhubungan dengan tema penelitian. Fokus utama diarahkan pada tiga aspek: teologi gender dalam teks keagamaan, konstruksi peran gender di masyarakat Muslim, serta keterlibatan perempuan dalam ranah politik Islam. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*), di mana isi dari berbagai sumber ditafsirkan untuk memahami bagaimana pemikiran tentang gender dalam Islam dikembangkan dan diaplikasikan dalam konteks historis maupun kontemporer.

Proses analisis dilakukan secara sistematis dengan mengorganisir data, mengidentifikasi pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan dari sumber- sumber yang dikaji. Untuk meminimalisir bias, penelitian ini menggunakan pendekatan kritis terhadap berbagai perspektif, baik dari tafsir klasik maupun modern, serta membandingkan pandangan dari pemikir-pemikir Islam progresif. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai dinamika politik gender dalam Islam serta kontribusi perempuan dalam membentuk kebijakan yang lebih adil dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teologi Gender dalam Islam: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Teologi gender dalam Islam berakar pada Al-Qur'an dan Hadis, dua sumber utama ajaran Islam. Dalam Al-Qur'an, prinsip dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan adalah kesetaraan dalam penciptaan dan tanggung jawab moral. Surah An-Nisa (4:1) menegaskan bahwa manusia diciptakan dari jiwa yang satu, menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا سَوْجَدَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

"Hai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darinya Allah menciptakan pasangannya, dan dari keduanya Dia mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak".¹

Ayat ini menekankan kesetaraan ontologis antara laki-laki dan perempuan, meskipun keduanya diberikan peran sosial yang dapat berbeda. Kesetaraan ini juga tercermin dalam tanggung jawab moral mereka, seperti yang ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab (33:35):

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ... نَهُم مَّعْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan Muslim, laki-laki dan perempuan mukmin... bagi mereka ampunan dan pahala yang besar".²

Dari ayat ini, terlihat bahwa tidak ada diskriminasi dalam penilaian amal berdasarkan gender. Al-Qur'an memberikan penghargaan yang setara kepada laki-laki dan perempuan yang beriman. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat prinsip kesetaraan gender ini. Dalam sebuah riwayat yang terkenal, Nabi bersabda:

النِّسَاءُ شَقَائِقُ النَّجَالِ

"Perempuan adalah saudara kandung laki-laki".³

Hadis ini menunjukkan bahwa perempuan adalah mitra sejajar laki-laki dalam penciptaan dan tanggung jawab keagamaan. Kesetaraan ini tercermin dalam hak dan kewajiban keduanya dalam beribadah, pendidikan, dan kehidupan sosial. Namun, dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim yang mempraktikkan pandangan gender yang dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hal ini seringkali disebabkan oleh interpretasi yang bias terhadap ayat-ayat tertentu, seperti Surah An-Nisa (4:34), yang berbunyi:

انزَجَالٌ قَنَامُنَ عَهَى النَّسَاءِ بِمَا فَضَمَّ أَلُّ بَعْضُهُمْ عَهَى بَعْضٍ وَبِمَا أَوْفَقَا مِنْهُ أَمَانِيهِمْ

"Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka".⁴

Ayat ini sering disalahpahami sebagai pembenaran superioritas laki-laki atas perempuan, padahal konteksnya lebih kepada tanggung jawab finansial laki-laki terhadap keluarganya. Banyak ulama kontemporer, seperti Fazlur Rahman⁵ dan Amina Wadud,⁶ menegaskan bahwa "qawwamun" di sini tidak berarti superioritas, tetapi fungsi pelindung dan pemberi nafkah.

Pandangan yang lebih inklusif terhadap teologi gender juga tercermin dalam peran perempuan di masa Nabi. Contohnya adalah Khadijah binti Khuwailid yang merupakan pengusaha sukses dan penasihat Nabi, serta Aisyah binti Abu Bakar yang menjadi rujukan ilmu agama. Kedua figur ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi penting dalam masyarakat Islam awal.⁷

Dengan demikian, teologi gender dalam Islam, seperti yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis, sebenarnya mengarah pada kesetaraan. Namun, interpretasi yang bias dan pengaruh adat dan budaya sering kali menjadi kendala dalam implementasinya. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika yang kritis dan kontekstual diperlukan untuk menggali esensi dari ajaran Islam tentang gender, sehingga dapat diaplikasikan secara lebih adil dalam kehidupan modern.

Konstruksi Gender dan Kekuasaan dalam Masyarakat Muslim

Konstruksi gender dalam masyarakat Muslim sering kali dipengaruhi oleh interpretasi agama yang dilakukan oleh ulama-ulama tradisional, yang cenderung mendasarkan

pandangannya pada struktur patriarkal. Misalnya, tafsir terhadap Surah An-Nisa (4:34), yang berbicara tentang peran laki-laki sebagai pemimpin keluarga, sering kali menjadi dasar untuk memposisikan laki-laki dalam posisi dominan di banyak aspek kehidupan sosial dan politik. Hal ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap teks-teks agama memainkan peranan penting dalam membentuk konstruksi sosial gender yang ada di masyarakat Muslim.⁸ Sebagaimana yang diungkapkan oleh Siregar (2020), meskipun tafsir ini sudah lama diterima, banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa ada kebutuhan untuk memperbaharui tafsir ini agar lebih relevan dengan situasi sosial saat ini dan lebih mengedepankan kesetaraan gender.⁹

Keterbatasan peran perempuan dalam banyak masyarakat Muslim lebih sering berkaitan dengan konstruksi sosial dan budaya daripada ajaran agama itu sendiri. Dalam banyak penelitian, seperti yang dijelaskan oleh Mahmud, meskipun Al-Qur'an dan Hadis memberikan ruang yang setara bagi perempuan dan laki-laki, interpretasi sosial sering kali menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dalam banyak hal, baik secara politik, sosial, maupun ekonomi.¹⁰ Umar Siregar menunjukkan bahwa peran perempuan sering kali dianggap terbatas pada ranah domestik, sementara laki-laki lebih banyak terlibat dalam ranah publik dan politik. Hal ini mengarah pada ketidaksetaraan yang berkelanjutan di berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan di tingkat keluarga dan masyarakat.

Lebih lanjut, kekuasaan dalam masyarakat Muslim sering kali dipertahankan oleh norma sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Kekuasaan yang lebih besar sering diberikan kepada laki-laki, baik dalam keluarga maupun di ranah publik. Dalam banyak masyarakat, laki-laki dianggap lebih kompeten dalam memimpin dan membuat keputusan, sementara perempuan dianggap lebih cocok untuk mengurus rumah tangga dan keluarga. Mahmud menekankan bahwa meskipun ada perempuan yang berprestasi dalam bidang politik dan ekonomi, mereka tetap menghadapi kesulitan dalam menembus struktur kekuasaan yang sangat didominasi oleh laki-laki.¹¹ Rahayu (2021) juga menyatakan bahwa meskipun perempuan mulai terlibat dalam sektor publik, mereka masih mengalami hambatan besar terkait norma-norma yang menilai perempuan tidak seharusnya berada dalam posisi kekuasaan.

Namun, konstruksi gender dalam masyarakat Muslim tidak hanya dipengaruhi oleh teks agama, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial dan politik. Dalam beberapa dekade terakhir, ada peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Farida (2023) menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan pendidikan tinggi lebih aktif dalam dunia politik dan ekonomi, berusaha memperjuangkan hak-hak mereka dan mendobrak batasan-batasan yang ada dalam masyarakat. Pemberdayaan pendidikan ini menjadi kunci untuk merubah pandangan masyarakat terhadap peran perempuan dan memungkinkan mereka untuk lebih berperan dalam pengambilan keputusan.¹²

Meskipun ada perubahan positif dalam bidang pendidikan, hambatan terhadap partisipasi perempuan dalam sektor politik dan publik masih ada. Seperti yang dijelaskan oleh Rahmawati (2021), meskipun perempuan mulai memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki, mereka masih sering kali dihadapkan pada ketidaksetaraan dalam kesempatan untuk memimpin dan berpartisipasi dalam keputusan politik.¹³ Hal ini terjadi karena kekuasaan dalam masyarakat Muslim seringkali diwariskan secara turun-temurun dalam struktur patriarkal, di mana laki-laki memegang dominasi dalam posisi-posisi strategis.

Dalam masyarakat yang patriarkal, posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik sering kali terbatas. Di banyak negara Muslim, perempuan yang terlibat dalam politik masih harus menghadapi tantangan besar, seperti diskriminasi dan stereotip gender yang menghambat kemajuan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmud (2022) mengungkapkan bahwa meskipun ada perempuan yang berhasil dalam politik, mereka tetap menghadapi hambatan struktural yang sangat kuat dalam memperoleh akses kekuasaan yang setara dengan laki-laki.¹⁴ Ini menunjukkan bahwa perubahan dalam konstruksi kekuasaan tidak hanya memerlukan reformasi dalam tafsir agama, tetapi juga dalam struktur sosial dan politik secara keseluruhan.

Keterlibatan perempuan dalam politik dan ekonomi menjadi lebih terlihat dalam beberapa tahun terakhir, terutama di negara-negara Muslim yang mulai membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, misalnya, meskipun jumlah perempuan yang memegang posisi politik meningkat, mereka tetap harus menghadapi

hambatan yang berakar pada struktur patriarkal. Ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam politik di Indonesia masih terhalang oleh budaya yang sangat mengutamakan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, peningkatan kesadaran mengenai pentingnya partisipasi perempuan dalam politik telah membuka peluang bagi perempuan untuk mempengaruhi kebijakan yang lebih responsif terhadap hak-hak mereka.

Perubahan dalam tafsir agama, bersama dengan pendidikan dan pemberdayaan perempuan, diharapkan dapat merubah konstruksi gender dalam masyarakat Muslim. Seperti yang dijelaskan oleh Farida (2023), dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan yang setara dan kesetaraan hak, perempuan dapat memperjuangkan hak-hak mereka dalam politik, ekonomi, dan sosial.¹⁵ Dengan demikian, untuk mencapai kesetaraan gender, dibutuhkan upaya bersama dalam merombak tafsir, pendidikan, serta memperkuat gerakan feminis yang menuntut keadilan sosial dalam masyarakat Muslim.

Partisipasi Perempuan dalam Politik

Partisipasi perempuan dalam politik di negara-negara Muslim, meskipun mengalami kemajuan, masih menghadapi tantangan besar. Dalam konteks Indonesia, kebijakan kuota perempuan di legislatif telah meningkatkan keterwakilan mereka, namun hambatan struktural tetap ada. Aminah (2020) menyoroti bahwa meskipun kuota dapat meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih, mereka sering kali tidak dapat mempengaruhi keputusan politik secara signifikan, karena kekuasaan politik seringkali tetap didominasi oleh laki-laki yang memegang posisi-posisi utama. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan kuota, representasi politik perempuan masih terbatas dalam pengaruh nyata di tingkat keputusan.¹⁶

Pendidikan juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Hidayat (2021) menegaskan bahwa perempuan yang memperoleh pendidikan tinggi lebih cenderung untuk terlibat dalam politik karena mereka memiliki pengetahuan dan kesadaran yang lebih besar tentang hak-hak politik mereka. Pendidikan ini juga memberikan kesempatan untuk menanggulangi hambatan budaya yang menilai perempuan tidak cocok dalam ranah politik. Dengan pendidikan yang lebih baik, perempuan dapat mengembangkan kemampuan kepemimpinan mereka untuk berkompetisi di arena politik.¹⁷

Namun, selain pendidikan, faktor sosial dan budaya yang dipengaruhi oleh norma patriarkal juga memengaruhi rendahnya partisipasi perempuan. Rahman (2022) menyatakan bahwa meskipun terdapat perempuan yang berhasil menempati posisi penting dalam pemerintahan, mereka sering kali menghadapi hambatan berupa diskriminasi struktural yang menghambat pengaruh mereka dalam pengambilan keputusan politik. Pandangan konservatif terhadap peran perempuan dalam masyarakat masih menjadi penghalang besar bagi kemajuan politik mereka.¹⁸

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan untuk meningkatkan partisipasi perempuan adalah pemberian kesempatan kepada mereka untuk berperan dalam pembuatan kebijakan di luar isu domestik seperti keluarga dan pendidikan. Safitri (2020) berpendapat bahwa perempuan cenderung terlibat dalam isu-isu yang dianggap lebih "terjangkau" atau "sesuai" dengan peran tradisional mereka, sehingga mengurangi pengaruh mereka dalam kebijakan ekonomi atau luar negeri. Dengan memberikan mereka lebih banyak kesempatan untuk terlibat dalam sektor-sektor strategis, perempuan dapat memperluas pengaruh mereka dalam politik dan pembuatan kebijakan.¹⁹

Di sisi lain, meskipun tantangan besar tetap ada, perempuan yang terlibat dalam politik menunjukkan bahwa perubahan memang memungkinkan. Mansur (2023) menunjukkan bahwa dalam beberapa negara seperti Tunisia dan Indonesia, perempuan yang terpilih untuk posisi politik, dengan adanya dukungan kebijakan kuota atau pelatihan kepemimpinan, berhasil mengatasi hambatan dan berperan penting dalam pembentukan kebijakan publik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hambatan sosial masih ada, dengan kebijakan yang mendukung, perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam politik.²⁰

Dalam sebuah buku "*The Gendered Society*" karya Michael Kimmel, yang membahas tentang bagaimana konstruksi gender memengaruhi peran politik perempuan di berbagai belahan dunia. Kimmel (2017) dalam bukunya *The Gendered Society* berpendapat bahwa politik tidak hanya dipengaruhi oleh struktur kekuasaan atau kebijakan formal, tetapi juga oleh cara

masyarakat memahami dan membentuk identitas gender. Dalam banyak masyarakat, politik sering kali dianggap sebagai ranah laki-laki, sementara perempuan dianggap kurang sesuai untuk menduduki posisi kekuasaan. Hal ini mengarah pada keterbatasan peran perempuan dalam politik, meskipun mereka memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki. Kimmel menekankan bahwa untuk memperbaiki ketimpangan ini, penting bagi masyarakat untuk merubah pandangan yang menghubungkan politik dengan maskulinitas dan menganggap perempuan sebagai individu yang mampu terlibat dalam ranah politik yang lebih luas.²¹

Selain itu, Kimmel juga mengungkapkan bahwa perubahan konstruksi gender dalam masyarakat dapat membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Pendidikan, kesadaran sosial, dan perubahan budaya memainkan peran penting dalam memungkinkan perempuan untuk terlibat lebih aktif dalam dunia politik. Kimmel menekankan bahwa ketika perempuan diberi kesempatan dan dukungan yang tepat, mereka dapat mempengaruhi kebijakan yang tidak hanya menguntungkan mereka, tetapi juga membawa perubahan yang lebih inklusif dan beragam dalam masyarakat. Oleh karena itu, memperjuangkan kesetaraan gender dalam politik bukan hanya soal mengubah struktur politik formal, tetapi juga mengubah norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam ranah publik.²²

SIMPULAN

Politik gender dalam Islam mencakup pemahaman tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun Islam menegaskan kesetaraan gender dalam prinsip dasar, seperti dalam Surah An-Nisa (4:1) yang menyatakan bahwa manusia diciptakan dari jiwa yang satu, praktik sosial seringkali menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Interpretasi terhadap ayat-ayat tertentu, terutama yang berkaitan dengan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sering dipengaruhi oleh pandangan patriarkal yang membatasi partisipasi perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Kesetaraan gender dalam politik Islam seharusnya dapat tercermin dari peran perempuan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Namun, struktur kekuasaan yang patriarkal dan interpretasi agama yang konservatif sering kali menghalangi perempuan untuk mencapai posisi kepemimpinan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan pemahaman yang kontekstual terhadap teks-teks agama, serta pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan kesadaran sosial, politik gender dalam Islam dapat berkembang menuju kesetaraan yang lebih nyata dalam kehidupan politik dan sosial..

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Surah Al-Ahzab (33:35) Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:1)
Al-Qur'an, Surah An-Nisa (4:34).
Aminah. N. (2020), Kebijakan Kuota dan Partisipasi Perempuan dalam Politik Indonesia. Jakarta: Penerbit Aksara.
Farida. I. (2023), Pendidikan dan Kesetaraan Gender di Indonesia: Meningkatkan Peran Perempuan dalam Politik. *Jurnal Pendidikan dan Gender*, 19(1).
Hanbal bin Ahmad, Musnad Ahmad, Jilid 6, Hal. 256.
Hidayat. A. (2021), Pendidikan dan Peran Perempuan dalam Politik di Negara Muslim. Bandung: Penerbit Alfabeta.
Kimmel. M. (2017), *The Gendered Society*. New York: Oxford University Press. Mahmud. S. (2022), Perempuan dalam Politik: Analisis Kekuasaan dan Gender di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Politik Islam*, 14(3).
Mansur. R. (2023), Perempuan dan Kepemimpinan Politik di Dunia Muslim: Studi Kasus di Tunisia dan Indonesia. *Jurnal Politik Global*, 8(2).
Rahayu. M. (2021), Ketimpangan Ekonomi dan Pemberdayaan Perempuan: Perspektif Gender di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Gender*, 18(1).
Ramlah. N. & Zain M. (2022), *Perempuan dalam Tradisi Islam: Studi Teologi dan Sosial*, Jakarta: Penerbit Paramadina.
Rahman Fazlur. (2020), *Islam: Ideology and the Way of Life*, Jakarta: Penerbit Mizan. Rahman. F. (2022), *Perempuan dan Politik: Menghadapi Hambatan Struktural di Dunia*

Muslim. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Rahmawati. A. (2021), Patriarki dalam Politik dan Kekuasaan di Dunia Muslim: Hambatan bagi Perempuan. *Jurnal Studi Islam dan Gender*, 29(3).

Safitri. R. (2020), Perempuan dalam Politik: Membuka Ruang Partisipasi Lebih Luas. Surabaya: Penerbit Lintas Pustaka.

Wadud Amina. (2021), *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

U. Siregar. (2020), Gender dalam Tafsir Al-Qur'an: Sebuah Pendekatan Kritis. *Jurnal Fiqh*, 25(2).